

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penelitian mengenai Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Variabel Makroekonomi dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dengan Korupsi Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus pada 30 Provinsi Periode 2021-2024) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Temuan hasil deskriptif mengenai produk domestik regional bruto (PDRB), investasi asing langsung (FDI), pengeluaran pemerintah, *Islamic Human Development Index* (I-HDI), tingkat inflasi dan tingkat korupsi adalah sebagai berikut:
  - a) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap provinsi yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan kondisi dan kinerja perekonomian yang tidak sama. Secara umum rata-rata PDRB yang dijadikan sampel dalam penelitian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PDRB tertinggi di setiap tahunnya, mencerminkan bahwa DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Provinsi Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara menjadi provinsi yang memiliki nilai PDRB rendah, menunjukkan kurangnya aktivitas perekonomian yang pesat di provinsi-provinsi tersebut.
  - b) Investasi asing langsung (FDI) rata-rata dalam kurun waktu tahun 2021-2024 memiliki arah tren yang positif dengan meningkat setiap tahunnya. Investasi asing langsung di Indonesia memperlihatkan konsentrasi yang tinggi di pulau Jawa, yaitu provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Selain itu, Maluku Utara juga menjadi provinsi yang memiliki nilai FDI tinggi. Keunggulan dan potensi sumber daya alam/ekonomi yang dimiliki setiap provinsi berbeda-beda dan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Promosi kekayaan yang dimiliki oleh provinsi pun menjadi salah satu cara untuk bisa menarik investor. Maluku

dan Gorontalo menjadi provinsi yang memiliki nilai FDI terendah, hal itu disebabkan minimnya sumber daya alam/ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan baik.

- c) Pengeluaran pemerintah pada periode tahun 2021-2024 memiliki realisasi anggaran yang berbeda-beda. Realisasi pengeluaran pemerintah terbesar ada di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Pengeluaran pemerintah di tahun 2021 berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Pengeluaran pemerintah bergantung terhadap apa yang menjadi prioritas negara di setiap tahunnya. Pengeluaran tersebut menjadi stimulus bagi perekonomian untuk memberikan manfaat secara agregat bagi masyarakat.
- d) Nilai *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di setiap provinsi yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun nilainya berfluktuatif. Nilai I-HDI tersebut memiliki nilai yang tinggi, tetapi cenderung menurun beberapa tahun selanjutnya. Nilai I-HDI berdasarkan dari tahun 2021-2023 mengalami tren yang positif dengan terus naik, yang menggambarkan bahwa kualitas manusia di Indonesia itu membaik. Namun, di tahun 2024 tingkat I-HDI tersebut mengalami penurunan yang sangat rendah bahkan lebih nilai I-HDI di tahun tersebut lebih rendah dari tahun 2021 sebelumnya. Nilai-nilai I-HDI ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap provinsi. Provinsi yang memiliki nilai I-HDI tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
- e) Tingkat inflasi di setiap provinsi Indonesia berbeda-beda, di tahun 2021 tingkat inflasinya ini rata-rata memiliki nilai yang rendah. Hal tersebut terjadi karena Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Tingkat inflasi tahun 2022 sangat tinggi, hampir di semua provinsi yang ada, itu mencerminkan bahwa perekonomian di Indonesia sudah kembali berjalan. Masa transisi pemerintahan dan ketidakpastian politik global menyebabkan tingkat inflasi di tahun 2023-2024 rendah.

- f) Tingkat korupsi di semua provinsi yang dijadikan sampel mengalami peningkatan. Skor yang diberikan oleh KPK di semua provinsi tersebut memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya, itu berarti provinsi tersebut lebih rentan melakukan korupsi. Provinsi paling tidak korupsi adalah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, menandakan bahwa masyarakat di sana berkualitas. Kecenderungan untuk melakukan korupsi di Indonesia semakin meningkat dengan menurunnya nilai skor dari KPK tersebut.
2. Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) menggambarkan aktivitas perekonomian di setiap provinsi Indonesia yang tinggi. PDRB yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi seperti manufaktur/industri berjalan dengan baik seiring dengan penyerapan tenaga.
  3. Investasi asing langsung (FDI) berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia. Nilai FDI yang tinggi di setiap provinsi berhasil memberikan kontribusi dengan menyerap tenaga kerja Indonesia. Nilai FDI mampu dimaksimalkan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja sehingga masyarakat dapat mendapatkan pekerjaan yang layak.
  4. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pengeluaran pemerintah yang tinggi belum mampu untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di setiap provinsi Indonesia. Seharusnya semakin banyak yang dibelanjakan maka semakin baik pula akibatnya bagi perekonomian. Pengeluaran pemerintah sebaiknya dikeluarkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi jangka panjang dengan penyediaan lapangan kerja layak yang banyak, bukan bantuan tunai atau sosial yang bersifat konsumtif.
  5. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia. Semakin tingginya kualitas hidup manusia, akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari

pekerjaan. I-HDI menunjukkan kualitas sumber daya manusia. I-HDI yang tinggi di Indonesia seiring dengan tingginya penyerapan tenaga kerja. Susahnya tenaga kerja di Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan adalah rendah kualitas masyarakatnya. Pendidikan menjadi salah satu dari hal yang mendasari tingginya nilai I-HDI tersebut, maka dari itu pendidikan yang baik mendorong individu mudah mendapatkan pekerjaan.

6. Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia, Inflasi yang tinggi atau sangat rendah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan akan menyebabkan PHK sebagai upaya untuk menekan biaya. Inflasi di Indonesia saat ini sangat rendah, mendekati terjadinya resesi ekonomi. Banyak perusahaan yang bankrut dan melakukan PHK besar disebabkan oleh perekonomian yang mengalami stagnasi, tercermin dari rendahnya tingkat inflasi.
7. Korupsi tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Seharusnya tingkat korupsi yang tinggi berdampak pada kebijakan ekonomi, korupsi menghalangi kebijakan yang mendorong ekonomi inklusif. Namun, korupsi dalam hal ini menjadi pelumas dalam mendorong jalannya perekonomian sehingga korupsi belum mampu berpengaruh dalam memperkuat atau memperlemah hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.
8. Korupsi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan investasi asing langsung (FDI) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Ketidakpastian ekonomi karena korupsi menghambat investasi yang menciptakan lapangan kerja. Korupsi mampu menjadi penyebab gagalnya investor yang akan menanamkan modalnya di dalam negeri. Biaya tambahan diakibatkan dari adanya korupsi menyebabkan investasi asing yang akan memperluas usaha atau membuka lapangan kerja di Indonesia gagal.
9. Korupsi tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Korupsi

belum mampu mengurangi ketidakefektifitasan pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan konsumsi masyarakat. Korupsi menjadi pelumas dalam mendorong pengeluaran pemerintah. Skor yang diberikan KPK belum mampu merepresentasikan korupsi di setiap provinsi Indonesia.

10. Korupsi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Korupsi merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu. I-HDI yang tinggi dapat berubah dengan korupsi yang tinggi, faktor-faktor yang mendasari I-HDI tersebut tidak bisa dimaksimalkan dengan tingginya korupsi. Rendahnya korupsi ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik.
11. Korupsi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan tingkat inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Korupsi menyebabkan biaya tambahan dalam semua transaksi perekonomian. Hal tersebut berdampak secara agregat sehingga berpengaruh terhadap inflasi yang menyebabkan perubahan dalam terserapnya tenaga kerja.
12. Secara simultan produk domestik regional bruto (PDRB), investasi asing langsung (FDI), pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi dan tingkat korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa ketika perekonomian (makroekonomi) berkembang secara keseluruhan atau agregat, maka akan berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja.

## 5.2 Implikasi

### 5.2.1 Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memperkuat Teori Hukum Okun, menegaskan keberadaan hukum Okun yang menyatakan bahwa peningkatan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi yaitu PDB riil atau output ekonomi ini seiring dengan terjadinya peningkatan juga pada penyerapan tenaga kerja di suatu negara tersebut. Selain itu, menegaskan kesesuaian pernyataan dari Ibn Khaldun yang menyebutkan bahwa jika permintaan terhadap output atau suatu produk mengalami peningkatan, hal tersebut akan mendorong perbaikan dan pengembangan dalam memproduksi

produk tersebut, yaitu perbaikan dan pengembangan pada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Temuan ini juga memberikan kontribusi tambahan terhadap literatur yang membahas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Indonesia.

### 5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil temuan dalam penelitian ini dapat memberikan implikasi nyata terhadap pemerintah dan masyarakat:

1. Bagi pemerintah, pemerintah dapat fokus terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja sangat banyak seperti sektor pertanian, perikanan & kehutanan dan juga sektor pengolahan atau manufaktur. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan produksi dan konsumsi masyarakat secara agregat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi seperti, padat karya, stimulus bantuan tunai langsung dan bantuan modal umkm sehingga nilai PDB negara akan maksimal. Kemudian, pemerintah bisa memaksimalkan nilai FDI Indonesia yang sangat tinggi untuk dijadikan modal pengembangan perusahaan-perusahaan, salah satunya yaitu dapat menyediakan lapangan kerja layak yang banyak. Pemerintah bisa menyalurkan anggaran di setiap tahunnya untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang, contoh seperti investasi pendidikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar, pelatihan tenaga kerja berkualitas dan subsidi kebutuhan pokok seperti listrik, air dan bbm. Pemerintah dapat mendorong masyarakat Indonesia agar lebih berkualitas, dengan menfokuskan anggaran di sektor pendidikan. Pemerintah mengatur tingkat inflasi yang baik bagi ekonomi, dengan melihat bagaimana persediaan barang-barang kebutuhan di masyarakat dan menstabilkan kondisi negara. Pemerintah bisa meminimalisir terjadinya korupsi dengan membuat peraturan kuat yang mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan korupsi sehingga perekonomian dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh adanya korupsi.

2. Bagi masyarakat, sebagai pelaku ekonomi masyarakat dapat fokus dalam melakukan hal-hal produktif yang dapat mendorong aktivitas ekonomi secara agregat nantinya. Masyarakat juga bisa mempersiapkan diri agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, untuk dapat memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Masyarakat dapat menggunakan bantuan dan subsidi dari pemerintah sebagai modal dalam ekonomi.

### 5.3 Rekomendasi

1. Untuk pemerintah, perlu fokus mengembangkan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat antara lain sistem ekonomi padat karya bukan padat modal, bantuan yang sifatnya produktif atau membangun seperti beasiswa pendidikan, pelatihan tenaga kerja dan bantuan modal. Perlu juga membuat peraturan-peraturan yang berorientasi terhadap kesejahteraan tenaga kerja seperti sayarat TKDN bagi perusahaan asing yang berdampak pada tersedianya lapangan kerja layak. Perlunya mempromosikan kekayaan, sumber daya atau kelebihan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sehingga banyak negara asing yang ingin menanamkan modalnya. Perlunya pemerintah membuat aturan bisnis atau ekonomi yang tidak sulit, untuk mempermudah dan menarik minat para investor. Perlunya pemerintah menghukum para pelaku korupsi agar tidak mengganggu jalannya ekonomi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas tahun penelitian dan menambahkan variabel lainnya, termasuk variabel ekonomi dan keuangan Islam yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat analisis lain untuk dapat mengetahui hubungan jangka Panjang atau pendeknya agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya yaitu beberapa teori yang digunakan belum tetap atau konsisten, terbatasnya sampel penelitian dan terbatasnya variabel yang mereprestasikan ekonomi Islam.